

Konstruktivisme sebagai Pendekatan Alternatif dalam Hubungan Internasional

Iva Rachmawati, M.Si¹

Abstract

In the study of international relation, Constructivism proposes an alternative way to analyze international phenomenon. It evaluates that the two previous approach, Realism and Liberalism failed in explaining some policies makings by certain countries in differents issues. This approach is built above three elements, those are: relativism, subjectivism dan the openness. Through these elements, constructivism tries to avoid the weaknesses as the positivist approach has, for instance: positivist believes that reality can only be explained by theoretical frame. This denotes reality can be constructed, because the frame itself consist of particular values. Thus, the knowledge is based on deeds concept or speech which has capability in building social costructivism.

Furthermore, Constructivism tries to replace material condition to ideas as the base of international system. This is an important part of Constructivism because ideas was put as the main factor on influencing state behaviours and international relations. The impact of this approach is we can find that instead of the defence and economic issues some issues, such as enviromental issue, gender issue and human rights issue can determine state behaviours.

Keywords: *Constructivism, ideas, deeds, material condition.*

1 Iva Rachmawati adalah pengajar pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasioal, UPN “Veteran” Yogyakarta dan meneliti bidang-bidang kajian diplomasi dan negosiasi.

Pendahuluan

Dalam studi Hubungan Internasional, beberapa pendekatan klasik seperti realisme dan Liberalisme memang masih memiliki kedudukan utama dan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam analisa hubungan internasional. Namun demikian, isu-isu yang sesungguhnya telah muncul di tahun 70an, seperti isu lingkungan, hak asasi manusia dan gender semakin menguat. Persoalan yang semula tidak dianggap penting ini nyatanya telah berhasil mempengaruhi pengambilan keputusan pada beberapa negara. Bahkan, institusi internasional yang beranggotakan negara yang mengusung isu-isu semacam ini semakin menguat. PBBpun semakin berhasil mendorong beberapa hal penting berkaitan dengan isu lingkungan misalnya melalui UNFCCC (*United Nation Framework Convention on Climate Change*).

Perubahan perilaku negara yang kemudian menjadi lebih diarahkan pada isu-isu yang semula tidak dianggap penting dan hubungan antara negara ini sangat jarang dibahas dalam pendekatan Realis dan juga liberalis. Meski mereka kaum realis mulai memuatkan ancaman

non tradisional dalam pertimbangan hubungan antar negara. Tulisan Nilufar Karacasulu dan Elif Uzgoren dalam “Explaining Social Constructivist Contributions to Security Studies” (<http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/02/KaracasuluUzgoren.pdf>), adalah contoh bagaimana pendekatan baru ini mencoba memenuhi kebutuhan untuk menjelaskan studi keamanan dari perspektif yang berbeda. Namun demikian isu-isu semacam hak asasi manusia dan gender belum lagi menjadi hal yang dianggap mampu mempengaruhi struktur keamanan sebuah negara. Mereka yang bernaung dibawah pendekatan Liberalisme, meski sedikit banyak telah menyentuh isu lingkungan dan gender dalam hubungan internasional, tetapi hal itu bukan menjadi kajian utama dalam menelaah perilaku antar negara. Dalam perspektif Liberalisme, motivasi utama negara dalam melakukan kerjasama semata-amata adalah alasan logis yang dibangun dari kepentingan ekonomi dan kesejahteraan.

Dengan demikian, ada beberapa perilaku negara yang tiak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui kedua pendekatan tersebut. Misalnya alasan mengapa beberapa negara mau

menandatangani CEDAW (*Convention on the Elimination of all Forms Discrimination Against Women*), mengapa ada beberapa negara yang dengan sukarela hadir dan menandatangani kesepakatan-kesepakatan yang berkaitan dengan lingkungan dan lain sebagainya.

Keterbatasan ini menghadirkan sebuah perspektif lain yang disebut dengan Konstruktifisme. Konstruktifisme hadir dalam perspektif internasional untuk menyumbangkan cara berpikir yang berbeda dengan pandangan yang telah ada sebelumnya, terutama pendekatan realisme, liberalisme dan bahkan neorealis dan neoliberalis. Konstruktifisme lahir sejalan dengan ide teoritis kritis lainnya yang membongkar cara-cara kaum positivis membangun pengetahuan dan membongkar fenomena. Meski demikian, perlu diketahui bahwa Konstruktifisme tidak seutuhnya berjalan beriringan dengan teoritis kritis lainnya, terutama Posmodernism, karena memiliki beberapa perbedaan mendasar.

Tulisan ini akan merunut munculnya Konstruktifisme dalam studi hubungan internasional, hal-hal apa saja yang mendorong hadir dalam pendekatan dalam studi hubungan internasional, apa perbedaannya dengan pendekatan lain dalam hubungan internasional dan sumbangannya dalam menguraikan fenomena dalam hubungan antar negara. Tulisan

Pembahasan

Richard Price dan Christian Reus-Smit menengarai beberapa hal yang membuat Konstruktifisme memiliki rumah yang sama dengan pendekatan kritis yang lain, yaitu: secara epistemologis, teori kritis mempertanyakan pendekatan-pendekatan pengetahuan positivis, mengkritisi upaya formulasi obyektif, pernyataan kebenarantentang dunia alam dan sosial yang dapat dibuktikan secara empiris. Secara metodologis, mereka menolak hegemoni metode ilmiah tunggal, mendukung pluralitas pendekatan dalam pembuatan pengetahuan sekaligus menekankan pentingnya strategi-strategi interpretif. Secara ontologis, mereka menentang konsepsi-konsepsi rasionalis mengenai sifat alami dan tindakan manusia, menekankan lebih kepada konstruksi sosial identitas-identitas aktor dan pentingnya identitas dalam konstitusi kepentingan dan tindakan. Secara normatif, mengutuk teorisasi bebas nilai, menyangkal segala kemungkinannya,

serta bersuara bagi pengembangan teori-teori yang eksplisit berkomitmen untuk mengungkap dan mengakhiri struktur dominasi (Asrudin dan Mirza Jaka Suryana, 2009:193).

Pendekatan ini juga akan memperkaya pendekatan kritis karena memberikan dasar moral bagi hubungan antar negara. Konstruktifisme dianggap mampu menjadi jembatan baru yang tidak hanya mampu menghadirkan kritikan saja seperti yang dikemukakan Price dan Reus Smit “*constructivism can make a vital contribution to the development of critical international theory, offering crucial insights into the sociology of moral community in world politics. The advent of constructivism should thus be seen as a positive development, one that not only enables critical theorists to mount a more powerful challenge to neorealism and neoliberalism, but one that promises to advance critical international theory itself*” (Richard Price dan Christian Reus-Smit, “Dangeraou Liaisons? Critical International Theory and Constructivism”, <http://www.arts.ualberta.ca/~courses/PoliticalScience/661B1/documents/PriceReusSmithCriticalInternatITheoryConstructivism.pdf>)

Sedangkan perbedaan mendasar antara Konstruktifisme dan Posmodernisme adalah, Konstruktifisme dianggap merupakan sebuah pendekatan yang menyimpang dari pendekatan postpositivis. Namun demikian ada beberapa perbedaan penting yang memisahkan Konstruktivisme dengan Posmodernism. Menurut Mark Hoffman, Posmodernism menolak seluruh fundasionalisme. Pendekatan ini mengupayakan sebuah penjurungkirbalikan dari cara cara berpikir pasca pencerahan dimana (menurut Posmodernism) segala upaya untuk mengklaim pengetahuan dan penjelasan bagi hubungan antara negara selalu meminggirkan perspektif alternatif dan sebaliknya memproduksi hubungan-hubungan dominasi. Sebaliknya, Konstruktifisme (Price dan Smit menyebutnya sebagai Teori Kritis Modern) berpaling dari radikalisme semacam ini melalui apa yang disebut Hoffman sebagai fundasionalisme minimal. Hal ini terjadi karena Konstruktifisme masih melihat adanya sifat ketergantungan pengetahuan dan adanya hubungan antara moralitas dan kekuasaan. Maka, bagi Konstruktifisme, interpretasi yang dilakukan tidak boleh serampangan, mereka yang rasional mesti dibedakan dengan yang irasional

dan menempatkan etika atas konsensus minimal atas tindakan politik emansipatoris..

Kegagalan Positivis dalam Pemahaman Konstruktifisme

Paradigma positivis telah memisahkan subyek dan obyek teliti demi mendapatkan hukum hukum obyektif. Bagi mereka, pengetahuan hanya akan tumbuh dan berkembang ketika para peneliti bertindak pasif dan tidak bias dalam mengamati fenomena. Hal ini menjadi titik kritik dari Konstruktivism, yaitu emansipatoris (Asrudin dan Mirza Jaka Suryana, 2009:174):

1. Fakta-fakta pendukung teori
Uji empiris dalam metodologi positivis yang didasarkan atas proposisi pengontrol/pertanyaan teroris justru gagal menemukan apa realitas sesungguhnya karena fakta yang dimaksud hanyalah fakta yang berada dalam kerangka teoritis (tidak independen).
2. Aspek determinasi sebuah teori
Metode induksi dalam positivis tidak memungkinkan adanya proses untuk menghimpun seluruh bukti yang akan diteliti, oleh karenanya tidak sebuah teori tidak mungkin diuji secara universal. Dengan demikian, teori hanya menjelaskan fakta-fakta sejauh yang didapat saja.
3. Nilai mendukung fakta
Jika positivis beranggapan bahwa realitas hanya bisa dijelaskan dengan bingkai teori maka sama artinya dengan melihat fakta melalui bingkai nilai dan nilai sarat dengan kemungkinan akan konstruksi.
4. Hubungan antara pengamat dan obyek pengamatan
Hubungan antara pengamat dan obyeknya tidak akan pernah menghadirkan obyektifitas. Sebagai konsekuensi dari meleburnya pengamat dan obyek pengamatannya maka temuan ilmiah bukan lagi merupakan laporan mengenai realitas di "luar" pengamat melainkan residu dari proses kreasi literal. Dengan demikian, kebenaran mengenai realitas bukan tawaran utama dari pengetahuan.

Atas kelemahan positivis ini maka Konstruktivisme hadir dengan 3 asumsi dasar:

1. Relativisme, adalah bentuk pemikiran yang menjunjung keterbukaan sekaligus merupakan proses pencarian terhadap konstruksi-konstruksi baru secara terus menerus. Dengan demikian, konstruktivisme melihat realitas bercorak plural.
2. Subyektivisme, karena realitas diyakini berada dalam pikiran pengamat maka interaksi subyektif menjadi satu satunya cara untuk dapat mengakses realitas tersebut.
3. Keterbukaan, konstruktivisme mencapai sintesa melalui dialektika konsensus dengan tujuan untuk membangun paradigma baru sekaligus mempertahankan keterbukaan saluran komunikasi sehingga proses konstruksi selanjutnya tidak mengalami hambatan.

Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional

Pada tahun 1990an, Scott Burchill dan Andrew Linklater mencoba menunjukkan bahwa sampai masa ini, teori Hubungan Internasional belum juga mampu menjelaskan seluruh dinamika sistem internasional. Bagi mereka, tidak ada lagi teori Hubungan Internasional yang mampu menjadi acuan dan atau bahkan memprediksi pola-pola hubungan antar negara. Sasaran Burchill dan Linklater adalah realisme yang saat ini mendominasi teori-teori dalam studi Hubungan Internasional. Alih-alih menyajikan pengetahuan yang obyektif dan atau mendudukan diri menjadi pengamat yang netral, justru memperkuat status quo yang ada melalui metodologi positivis yang mereka pakai tersebut.

Konstruktivisme mulai hadir dalam Hubungan Internasional ketika Nicholas Onuf memperkenalkan Konstruktivisme pada tahun 1989 melalui "World of Our Making" yang kemudian dikembangkan oleh Alexander Wendt dalam artikelnya "Anarchy is What States Makes Of It" pada tahun 1992.

Nicholas Onuf dalam "World of Our Making" percaya bahwa pengetahuan ada di dalam konstruksi sosial. Pengamat tidak pernah

pada posisi netral, karena ide dan peristiwa bukan fenomena independen. Pengetahuan, dengan demikian selalu berada dalam relasi pada suatu konsteks spesifik. Dari proses ini ia menyimpulkan bahwa realitas internasionalpun merupakan hasil dari tindakan manusia. Demikian pula realitas dalam hubungan internasional merupakan hasil dari konstruksi manusia. Bangunan pengetahuan yang diajukan oleh Onuf adalah konsep *deeds* atau tindakan yang berupa ucapan yang mampu melakukan konstruksi sosial. Onuf juga menekankan bahwa makna dari realitas sosial tergantung pada eksistensi aturan-aturan karena aturan akan memandu tingkah laku manusia yang kemudian memungkinkan adanya pemahaman bersama. Maka, bagi Onuf aturan adalah bagian yang cukup penting dalam kehidupan sosial.

Sedangkan dalam "*Anarchy is What States make of It*", Alexander Wendt menjelaskan melalui Perspektif Identitas (*Shared Identity Perspective*) yang menfokuskan diri pada wacana sosial dan komunikasi (tidak hanya interaksi fisik) antara aktor-aktor internasional, yaitu melalui isi dan pengaruh dari sejumlah komunikasi dan pertukaran ide yang mereka lakukan. "*structures of human association are determined primarily by shared ideas rather than material force*" (Henry Nau, 2009:47) Wendt menekankan bahwa "*Actors use ideas to construct relationships and material reality. So ideas precede negotiations and interpret history to make relationships either conflictual or cooperative* (Asrudin dan Mirza Jaka Suryana, 2009:48). Menurut Wendt, struktur dan sistem sosial mengandung 3 elemen, yaitu kondisi material, kepentingan dan ide-ide. Signifikansi dari kondisi material ditentukan oleh kepentingan. Sedangkan kepentingan akan ditentukan oleh ide-ide. Argumentasi Wendt ini memberikan kontribusi penting dalam Studi Hubungan Internasional, yaitu mengembalikan faktor yang sebelumnya ditolak dalam studi ini. Hal tersebut adalah menempatkan ide sebelum materi. Hal ini akan mengakibatkan dampak yang cukup berpengaruh dalam teori Ilmu Hubungan Internasional karena dasar pembentuk sistem internasional bergeser tidak lagi pada materi tetapi ide (Yucel Bozdaglioglu, "Constructivism and Identity Formation: An Interactive Approach", [http://www.turkishweekly.net/article/310/constructivism-and-identity-formation-an-interactive-](http://www.turkishweekly.net/article/310/constructivism-and-identity-formation-an-interactive-approach.html)

[approach.html](http://www.turkishweekly.net/article/310/constructivism-and-identity-formation-an-interactive-approach.html))

Wendt memberikan contoh penjelasan konstruktivisme dalam menjelaskan alasan berakhirnya perang dingin. Perang Dingin berakhir sama sekali bukan karena kemenangan Amerika atau bahwa Amerika mampu mendominasi dunia melainkan karena munculnya pemikiran baru di Uni Soviet dan Gorbachev yang melihat barat tidak lagi sebagai musuh serta menerima bergabungnya Jerman dalam NATO (hal ini juga lebih didorong karena berubahnya pertimbangan Gorbachev atas NATO, tidak lagi dipandang sebagai musuh, dan percaya bahwa menggabungkan diri pada satu aliansi tertentu merupakan hak Jerman).

Bagi Konstruktivis, kaum rasionalis (baik realis maupun liberalis) terlalu menyandarkan diri pada kepentingan materi dan *agent centric*. Oleh karenanya, kemunculan Konstruktivisme merubah pemilahan pendekatan dalam studi Hubungan Internasional dari trikotomi menjadi dikotomi, yaitu dari 3 aliran Liberalisme, Realisme dan Marxisisme Strukturalisme menjadi Rasionalisme (Liberalisme, Realisme dan Marxisisme Strukturalisme) di satu sisi dan di sisi lain adalah Konstruktivisme (John Hobson, 2000: 145). Perbedaan mendasar mereka terletak pada negara yang sama sekali tidak memiliki kepentingan bawaan (*given interest*), yang bagi kaum realist kepentingan ini selalu berupa kekuasaan. Dalam pandangan Konstruktivis, negara sama sekali tidak memiliki *given interest* karena negara terkungkung oleh struktur sosial yang normatif. Bahkan negara dianggap tidak mungkin *exist* atau ada secara terpisah dari yang lainnya. Negara saling mengenali satu dengan yang lain melalui asosiasi yang dijalin dengan negara lainnya (Henry Nau, 2009:47).

Dengan demikian identitas negara terkonstruksi oleh norma dan kemudian membentuk kepentingan-kepentingan tertentu. Norma yang ada bahkan mampu merekonstruksi identitas, dengan demikian maka kepentingan pun berubah sejalan dengan hal tersebut dan akhirnya akan merubah kebijakan negara. Kaum Konstruktivis bersikap lebih lunak pada kepentingan negara, sebab mereka percaya bahwa perubahan identitas akan berpengaruh pada perubahan kepentingan negara yang kesemuanya sejalan dengan perubahan-perubahan struktur

normatif.

Wendt mendeskripsikan 2 prinsip dasar Konstruktivisme, yaitu: 1. Struktur-struktur yang terbentuk dalam setiap asosiasi dibentuk oleh pertukaran ide dan bukan terjadi karena kekuasaan yang sifatnya material, 2. Identitas dan kepentingan dari aktor dikonstruksikan oleh ide-ide tersebut dan bukan sama sekali bersifat alamiah (James G. Mellon “Constructivism and Moral Argument in International Relations”, <http://www.cpsa-acsp.ca/papers-2009/Mellon.pdf>). Ted Hopf juga menemukan bahwa identitas negara akan mempengaruhi kepentingan nasional negara ketika ia berhadapan dengan kepentingan negara lain. Identitas negara terbentuk tidak hanya karena interaksinya dengan aktor lain di luar negara tetapi juga merupakan hasil dari interaksi dari masyarakat di dalam negara sendiri. Bagi Hopf, identitas domestiklah yang membentuk struktur kognitif yang akan menentukan ancaman, kesempatan, musuh, aliansi, dsb (-----, “Social Constructivism”, www.oup.com/uk/orc/bin/9780199285433/jackson_chap06.pdf. down load Desember 2011).

Namun demikian, persoalan agensi, struktur dan seberapa norma mampu mempengaruhi perilaku dan akhirnya membentuk identitas yang menentukan kepentingan nasional kemudian, merupakan perdebatan dalam Konstruktivisme itu sendiri. John Hobson kemudian mencoba memetakan hal tersebut menjadi 3 varian dalam Konstruktivisme, yaitu: *International Society-Centric Constructivism*, *State Centric Constructivism* dan *Radical Constructivism* (John Hobson, 2000: 149-156).

1. *International Society Centric Constructivism*

Varian ini menitikberatkan pentingnya struktur atas agensi karena percaya bahwa identitas dan kepentingan nasional negara ditentukan oleh struktur normatif dari masyarakat internasional.

Dalam bukunya “*National Interest in International Society*”, Martha Finnamore menjelaskan bahwa perilaku negara didefinisikan oleh identitas dan kepentingan. Sedangkan identitas dan kepentingan didefinisikan oleh kekuatan-kekuatan internasional yaitu norma yang melekat pada masyarakat internasional. Norma masyarakat internasional akan ditransmisikan kepada

negara melalui organisasi internasional. Mereka akan membentuk kebijakan nasional dengan “mengajar” negara seperti apa sebaiknya kepentingan nasional mereka. Norma yang ditawarkan oleh organisasi internasional ini dapat mempengaruhi negara dengan memaksa negara untuk mengadopsi norma-norma tersebut sebagai kebijakan nasional (-----, “Social Constructivism”, www.oup.com/uk/orc/bin/9780199285433/jackson_chap06.pdf. down load Desember 2011).

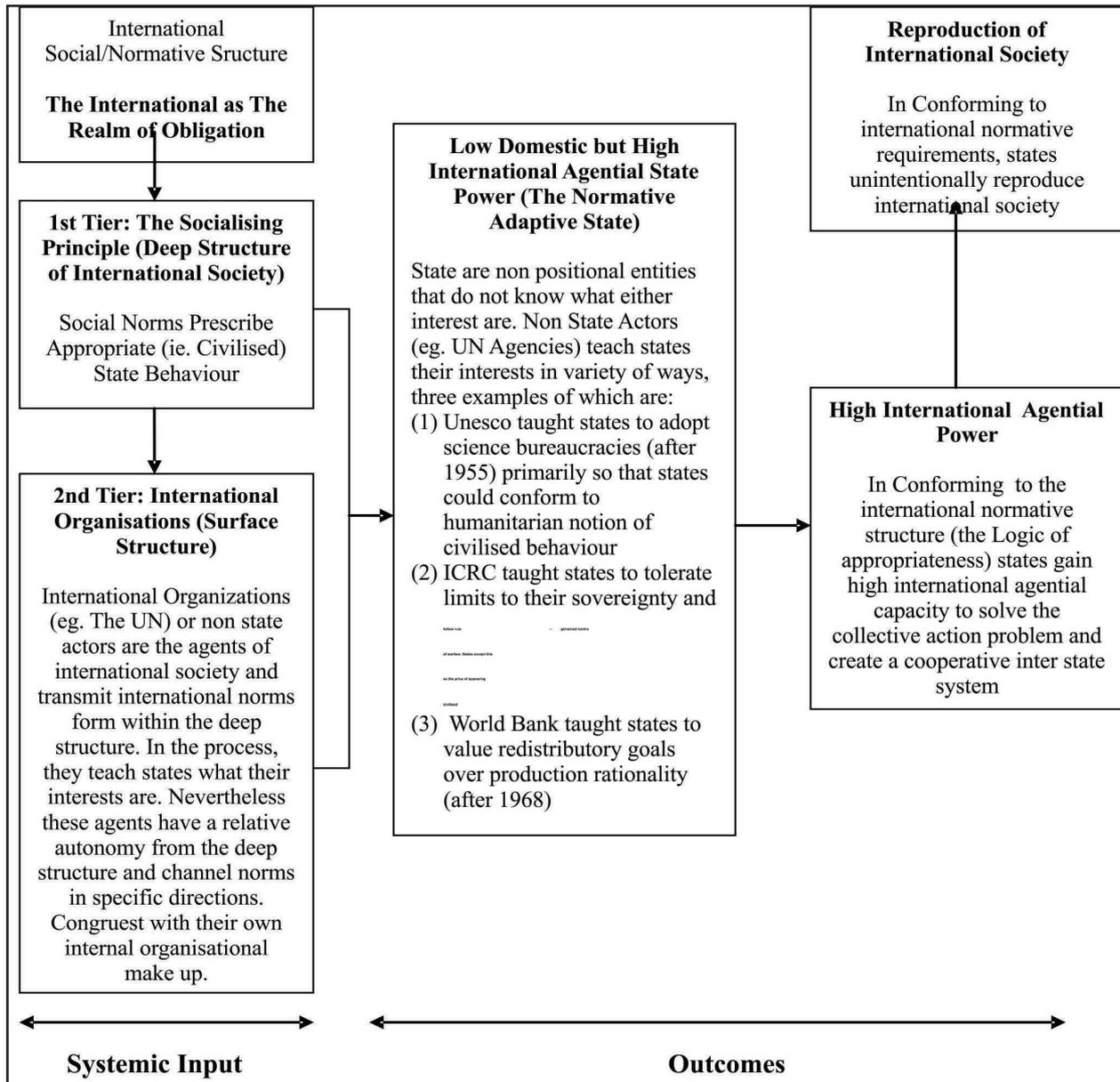
Finnamore melakukan 3 buah riset untuk membuktikan bahwa organisasi internasional mampu menjadi *active teacher* bagi negara untuk pada akhirnya mengadopsi norma masyarakat internasional. Studi kasus yang pertama ia mulai dengan pertanyaan mengapa negara meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya birokrasi setelah tahun 1955?. Setelah mengalami perubahan struktur internal di tahun 1954 karena bertambahnya anggota negara-negara yang baru merdeka. Perubahan ini mengakibatkan kebijakan dalam UNESCO khususnya dalam penyelenggaraan birokrasi. Pada tahun 1955, UNESCO mulai mendorong setiap negara untuk mengembangkan birokrasi yang akuntabel dengan cara menyakinkan kepada setiap negara bahwa norma baru ini akan membawa mereka kepada iklim yang jauh lebih modern dan beradab. Dalam 20 tahun jumlah negara yang mengadopsi hal ini berkembang dengan pesat (John Hobson, 2000:152)

Studi kasus yang kedua adalah mengenai usaha dari International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam mempromosikan Konvensi Geneva mengenai perlindungan terhadap tentara yang terluka, perlindungan terhadap tawanan, penyediaan bantuan kemanusiaan di kala terjadi konflik sipil dan juga akses bagi tawanan politik untuk mendapat bantuan kemanusiaan. ICRC sangat intens dalam menawarkan norma ini dan meyakinkan setiap negara bahwa negara yang beradab tentu akan mengesampingkan hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan bahkan. Akan lebih penting untuk tampak lebih ‘beradab’ bagi mereka ketimbang norma yang lain.

Kasus ketiga adalah diterimanya isu penanggulangan kemiskinan pada tahun 1968.

Sebelum tahun tersebut, isu tersebut nampak tidak berharga karena setiap negara secara rasional akan mengejar kepentingan ekonominya masing-masing. Namun demikian, Presiden Bank Dunia, Robert McNamara, telah memelopori sebuah perubahan dalam pembangunan ekonomi, yaitu menggeser isu produksi kepada isu redistribusi kemakmuran. Dan kewajiban menolong negara sedang berkembang menghadapi kemiskinan mereka adalah tanggung jawab negara kaya dengan jalan memberi bantuan dan pinjaman (-----, "Social Constructivism", www.oup.com/uk/orc/bin/9780199285433/jackson_chap06.pdf. down load Desember 2011).

Bagan. 1
International Society Centric Constructivism (Finnamore)



Sumber: John Hobson, *The State and International Relations*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, hal.150.

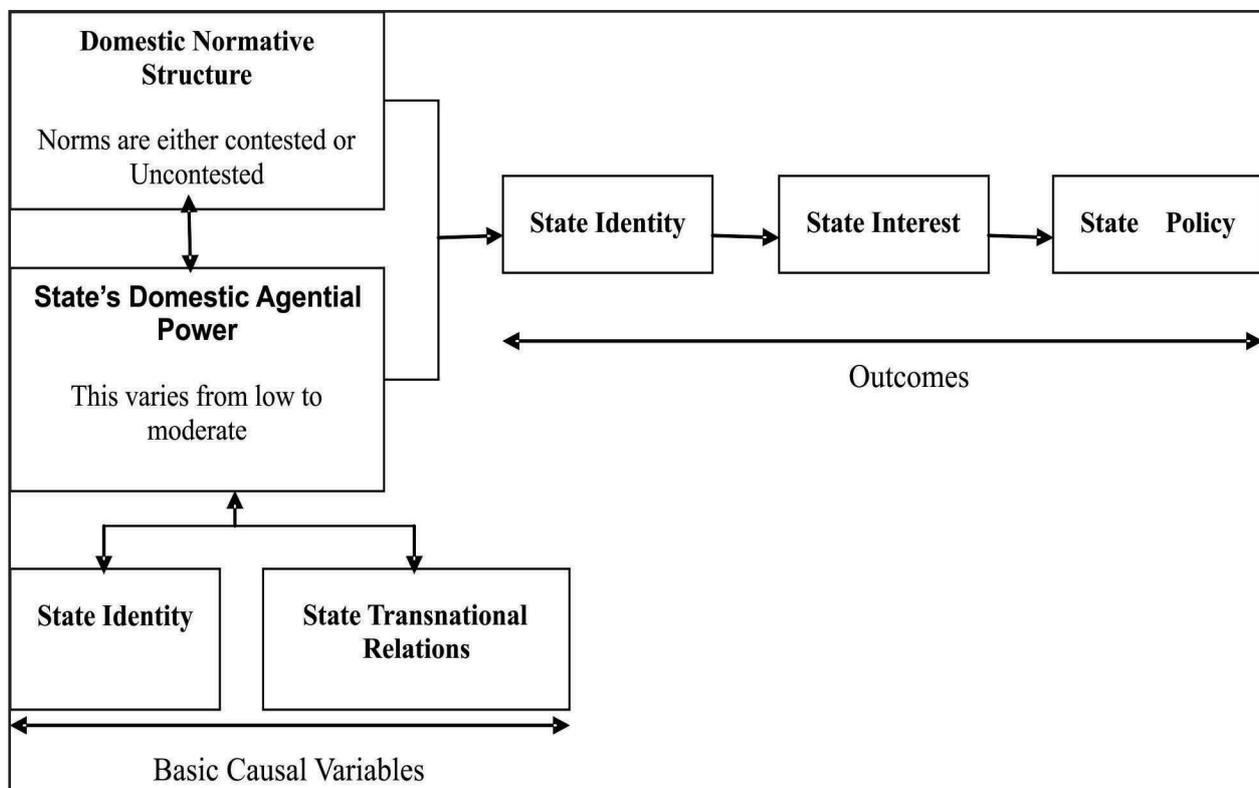
Dengan demikian Finnamore menyimpulkan bahwa negara tidak tersosialisasi oleh kekuatan material melainkan oleh prinsip-prinsip normatif internasional. Pada setiap kasus yang ditemukan Finnamore, negara berupaya mengadaptasi norma internasional ke dalam kebijakan dalam negeri negara. Baginya struktur memiliki pengaruh yang lebih besar dari agensi. Sehingga, negara

dengan mudah mengadaptasi norma baru tersebut dan bahkan melemahkan arti penting kedaulatan mereka demi *'civilised' state behaviour norms* yang ditawarkan tersebut.

2. *State Centric Constructivism*

Klaim Finnamore sebelumnya, menyatakan bahwa struktur internasional memiliki kekuatan yang lebih besar dalam mempengaruhi negara karena lemahnya agensi negara dan kebijakan negara bukan merupakan hasil dari kepentingan domestik. Hal ini tidak sejalan dengan kajian yang dilakukan Peter Katzenstein dalam bukunya *"Cultural Norms and Society Security"*. Menurut Katzenstein, penjelasan sistemik semacam ini tidak cukup menjelaskan hubungan yang terjadi dalam struktur negara sendiri sehingga mereka bersedia menerima norma internasional tersebut. Katzenstein menengarai kuatnya agensi negara mampu menandingi pengaruh dari norma internasional yang ditawarkan tersebut.

Bagan 2.
State Centric Constructivism (Katzenstein)



Sumber: John Hobson, *The State and International Relations*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, hal.167.

Peter Katzenstein menggarisbawahi pentingnya 3 struktur normatif (*domestic normative structure*) yang akan memandu negara dalam mengambil kebijakan, yaitu: norma keamanan ekonomi, norma keamanan militer eksternal dan norma norma keamanan internal. Struktur normatif domestik ini akan bertemu dengan norma internasional yang kadang-kadang tidak selalu saling mendukung tetapi saling bertentangan. Bagi Katzenstein, negara memiliki

struktur domestik yang kuat dan otonom, maka penting baginya untuk melihat hubungan domestik antara negara dan masyarakat dalam membentuk kebijakan negara.

Dalam kajiannya terhadap perubahan kebijakan Jepang yang militeristik sebelum tahun 1945 menjadi pasifist sesudah tahun 1945, Katzenstein menemukan pentingnya budaya dan identitas. Ia berpendapat bahwa pendekatan sistemik telah gagal menjelaskan pola

kebijakan keamanan Jepang setelah Perang Dunia II. Kebijakan luar negeri yang pasifist ketimbang militeristik tidak bersumber pada perubahan hubungan antar negara pasca perang melainkan perubahan struktur normatis domestiklah yang mendorong lahirnya kebijakan tersebut (John Hobson, 2000:1167). Pada tahun 1868 Jepang telah membuat sebuah konsensus untuk membangun kekuatan ekonomi yang cukup besar melalui insutrialisasi. Namun tentu saja hak ini akan membuat Jepang rentan terhadap pengaruh asing karena ketergantungannya terhadap bahan mentah. Maka, industri dan kekuatan militerpun dikembangkan untuk mengantisipasi hal tersebut. Pada masa diantara 1868-1945, kebijakan semacam ini tidak mendapat tentangan baik dari hubungan negara dan masyarakat (karena negara cukup otonom) maupun dari norma internasional yang imperialis. Namun demikian, kebijakan militeristik Jepang mendapat tentangan yang cukup kuat sesudah 1945 karena situasi domestik yang tidak mendukung karena rasa malu yang dialami Jepang atas kekalahannya di Perang Dunia II dan peran militeristik yang tidak lagi diperbolehkan dalam sistem internasional (termasuk didalamnya pasal 9 Konstitusi Jepang). Sebaliknya perubahan yang cukup penting juga terjadi pada kebijakan militer Jepang setelah tahun 80'an di masa PM Nakasone. Pada masa itu ide untuk mengakhiri kedekatan militer dengan AS cukup kuat, yang mana ide ini cukup mendapat dukungan domestik. Di luar, ide ini juga tidak terlalu mendapat tentangan karena didukung oleh kondisi ekonomi dan teknologi Jepang yang juga semakin berkembang. Namun, apa yang ingin disampaikan oleh Katzenstein adalah bahwa identitas domestik sebuah negara (yang tidak selalu sama satu negara dengan yang lainnya) memiliki kekuatan yang sama besar dengan struktur internasional dalam menentukan kebijakan negara.

3. *Radical Constructivism*

Radikal Konstruktivis merupakan teori yang radikal karena tidak lagi mendasarkan diri pada pengetahuan karena pengetahuan sendiri dianggap tidak merefleksikan obyektifitas *Radical constructivism, thus, is radical because it breaks with convention and develops a theory of knowledge in which knowledge does not reflect an "objective" ontological reality, but exclusively an*

ordering and organization of a world constituted by our experience. (Ernst Von Gaserfeld, "An Introduction to Radical Constructivism", <http://www.univie.ac.at/constructivism/EvG/papers/070.1.pdf>). Radikal Konstruktivis mendasarkan pemikirannya dengan mempersoalkan negara karena negara tidak dengan mudah dapat disamakan dengan kedaulatan, terlebih dengan identitas negara, legitimasi dan juga komunitas politik domestik, karena semua hal itu tidak bersifat materi. Semua hal tersebut merupakan hasil dari konstruksi sosial atau kadang disebut juga *normative statecraft*. *Normative statecraft* merujuk pada proses dimana negara menghasilkan sebuah imajinasi mengenai komunitas politik atau bangsa yang nampak harmonis. Imajinasi ini termasuk didalamnya "rasa kebersamaan" sebagai satu bangsa yang tinggal di wilayah tertentu karena pada kenyataannya setiap warga negara tidak mengenal satu dengan yang lainnya. Persoalan ini belum berhenti sampai disini saja karena kemudian negara memiliki kewajiban untuk mendefinisikan juga kelompok di luar negara sebagai 'other' atau orang asing. Melekatkan kepada mereka identitas yang mungkin berbeda (dan pada kenyataannya 'other' yang dimaksud justru memiliki kesamaan etnis atau bahasa dengan etnis atau kelompok penutur bahasa yang sama di dalam negara) demi membuat garis batas yang jelas sebagai satu bangsa. Tidak hanya melekatkan identitas, negara kadang bertindak sebagai penentu ancaman demi mempertahankan kekuasaan. 'Other' kemudian digambarkan sebagai kelompok/bangsa lain yang mengancam karena memiliki kepentingan yang berbeda atau bertentangan demi, sekali lagi, mempertahankan kohesitas domestik. Bahkan, negara juga nampaknya perlu memberikan paksaan kepada kelompok di dalam negara yang tidak mau menerima definisi bentukan negara tersebut sebagai 'internal other'. Dengan merujuk pada hal-hal tersebut, maka Cynthia Weber (John Hobson, 2000:159). mempertanyakan logika representasi dalam hubungan internasional karena segala hal yang berkaitan dengan negara merupakan hasil dari *normative statecraft* belaka. Adanya konsep 'ancaman' tersebut kemudian menjadi pembenar bagi dunia internasional yang anarkis dan kemudian menjadi hal yang wajar bagi setiap negara untuk membangun angkatan

bersenjataanya semaksimal mungkin. Dengan demikian, radical constructivism menilai bahwa ancaman yang sesungguhnya tidak berasal dari militer tetapi berasal dari kebijakan luar negeri yang kemudian memberikan definisi tersendiri terhadap situasi internasional. Jika radical constructivism disebut 'nihilistic' (menganggap negara bukan sesuatu yang tidak nyata) tidak terlalu tepat juga, karena perspektif ini lebih melihat negara bukan sebagai sesuatu yang sudah tetap, melainkan harus terus menerus diwacanakan termasuk dalam mendefinisikan kembali kedaulatan, legitimasi dan sifat-sifat negara. Gagasan mengenai negara dan juga bentuk institusi sosial lain bukanlah ada (*exist*) sebagai sesuatu yang sudah tetap, sementara legitimasi merupakan hal problematik.

Penutup

Dari tulisan di atas, maka dapat dilihat bahwa, Konstruktifisme hadir untuk melengkapai pendekatan dalam hubungan internasional karena dorongan beberapa hal yang dianggapnya tidak mampu dipenuhi oleh pendekatan positivis seperti Relisme dan Liberalisme. Konstruktifisme memberikan studi Hubungan Internasional peluang yang lebih besar untuk menelusuri ruang-ruang lain diluar konstruksi teoritis yang dibentuk oleh pendekatan sebelumnya yaitu teori-teori positivis yang memaksakan bingkai teori mereka dalam memolakan realitas sehingga tidak lagi bersifat obyektif. Oleh karenanya, Konstruktifisme mendasarkan dirinya pada elemen penting yaitu relatifitas, subyektifitas dan keterbukaan.

Meski menjadi bagian dari pendekatan post-positifis karena argumentasinya tersebut di atas, namun pendekatan ini juga memiliki ketidaksamaan dengan beberapa pendekatan post-positifis seperti Posmoderenism. Konstruktifisme menempatkan agen dan struktur sejajar dalam hubungan internasional. Mereka memiliki kemampuan yang sama dalam saling mempengaruhi dan merubah identitas maupun interest. Berbeda dengan Posmoderenism yang melihat hubungan keduanya sebagai hubungan yang subordinan dimana struktur merupakan bentukan atau konstruksi atas ide-ide, pengetahuan dan kekuasaan yang dominan.

Pada tiga bentuk Konstruktifisme

yang ditawarkan oleh John Hobson dapat dilihat bahwa interaksi kemudian menjadi kata kunci selanjutnya pada pendekatan ini. Ketiga struktur yang ditawarkan tersebut terbentuk atas interaksi ide yang dibawa oleh masing-masing struktur dan kemudia merubah atau mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan oleh negara atau mempengaruhi perilaku negara atau aktor non negara lainnya.

Referensi:

Buku:

Asrudin dan Mirza Jaka Suryana, *Refleksi Teori Hubungan Internasional dari Tradisional ke Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009

Hobson, John, *The State and International Relations*, Cambridge Univeristy Press, Cambridge, 2000

Nau, Henry, *Perspective on International Relations 2ed*, CQ Press, Washington DC, 2009

Website:

Bozdaglioglu, Yucel, "Constructivism and Identity Formation: An Interactive Approach", <http://www.turkishweekly.net/article/310/constructivism-and-identity-formation-an-interactive-approach.html> download Mei 2012

Ernst Von Gaserfeld, "An Introduction to Radical Constructivism", <http://www.univie.ac.at/constructivism/EvG/papers/070.1.pdf>, download Mei 2012

Kracasulu, Nilufar dan Elif Uzgoren, "Explaining Social Constructivist Contributions to Security Studies" (<http://sam.gov.tr/wp-content/uploads/2012/02/KaracasuluUzgoren.pdf>), download Mei 2012

Mellon, James G. "Constructivism and Moral Argument in International Relations", <http://www.cpsa-acsp.ca/papers-2009/Mellon.pdf>, down load November 2011.

Price, Richard dan Christian Reus-Smit, "Dangers Liaisons? Critical International Theory and Constructivism", <http://www.arts.ualberta.ca/~courses/PoliticalScience/661B1/documents/PriceReusSmithCriticalInternatTheoryConstructivism.pdf>, download Mei 2012 Social Constructivism", www.oup.com/uk/orc/bin/9780199285433/jackson_chap06.pdf. download November 2011.